



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

FONDASI KUAT LAYANAN HEBAT

BULETIN EDISI XXV



MOMENTUM HARI KELUARGA NASIONAL, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTA PERKUAT NILAI KELUARGA SEBAGAI FONDASI PENGABDIAN ASN



Kendari, 29 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari menggelar Upacara Peringatan di Halaman Upacara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, dengan mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”. Tema tersebut menjadi wujud penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga yang merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, menyampaikan bahwa keluarga adalah tempat pertama dalam menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, serta semangat pengabdian. “Semangat Hari Keluarga Nasional mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tempat bertumbuh, tetapi juga sumber inspirasi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dengan keluarga yang kuat, kita harapkan lahir ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan keimigrasian yang semakin berkualitas,” tegasnya.

Upacara ini menjadi momentum untuk memperkuat peran aparatur negara dalam membangun keluarga yang harmonis, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Ditjenim Sultra.

KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA TERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA UTARA TERKAIT PENGELOLAAN DESA BINAAN IMIGRASI

"Melalui studi tiru ini, kami berharap terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi antar satuan kerja. Tujuannya untuk memperkuat implementasi Desa Binaan Imigrasi sebagai wujud nyata pelayanan dan edukasi keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat," ujar Ganda.

KENDARI – Kanwil Ditjenim Sulawesi Tenggara menerima kunjungan studi tiru dari Kanwil Ditjenim Sumatera Utara terkait pengelolaan Desa Binaan Imigrasi. Rombongan disambut langsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Jumat (29/6). Studi tiru ini menjadi forum pertukaran praktik baik dalam pengembangan Desa Binaan Imigrasi.

Program tersebut merupakan salah satu strategi untuk memperkuat fungsi keimigrasian melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum keimigrasian di tingkat desa. Kanwil Ditjenim Sultra, Ganda Samosir, menegaskan bahwa Kanwil memiliki peran strategis dalam pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas UPT, termasuk implementasi program Desa Binaan Imigrasi.





KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA HADIRI SOSIALISASI PENGUATAN KEPATUHAN INTERNAL TERINTEGRASI

Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, menghadiri secara langsung kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh 272 peserta dari seluruh Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta meningkatkan budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan keimigrasian.





Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, yang memberikan pembekalan mengenai penguatan integritas, pencegahan gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta pentingnya pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari budaya antikorupsi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam arahannya menegaskan bahwa integritas dan kepatuhan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh insan imigrasi menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain menghadirkan narasumber dari KPK, kegiatan ini juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penguatan kepatuhan internal, peningkatan integritas aparatur, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh jajaran Imigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGERA IKUTI FGD PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA PENGUATAN TATA KELOLA ASET IMIGRASI



Jakarta, 3 Juli 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja imigrasi se-Indonesia ini dibuka oleh Kepala Biro Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat, A.Md.IP., S.H., M.M. Dalam paparannya, Kepala Biro BMN menegaskan pentingnya mewujudkan “Tata Kelola Aset yang Prima untuk Imigrasi Maju” sebagai landasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang semakin profesional, modern, dan akuntabel.

Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara pada kegiatan tersebut diwakili oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Koordinator Wilayah Pengelolaan BMN. Keikutsertaan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selama pelaksanaan FGD, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penguatan tata kelola aset, mulai dari perencanaan kebutuhan BMN yang harus mengacu pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), hingga proses pengadaan barang dan jasa yang mendukung kebutuhan operasional organisasi.



Selain itu, peserta juga mendapatkan paparan terkait kondisi aset di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk tantangan pengelolaan aset bernilai tinggi yang tersebar pada berbagai satuan kerja. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pengelolaan aset tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, namun juga harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang optimal bagi organisasi dan masyarakat.

FGD juga membahas berbagai isu strategis pengelolaan BMN, khususnya penyelesaian BMN rusak berat yang masih menjadi tantangan di sejumlah satuan kerja. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Biro BMN mendorong langkah-langkah terstruktur melalui inventarisasi, usulan penghapusan, kajian hukum, persetujuan penghapusan, penerbitan surat keputusan, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Materi lainnya yang menjadi perhatian peserta adalah percepatan penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. Penetapan PSP dinilai penting sebagai bentuk legalitas penggunaan aset negara serta untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan BMN pada seluruh satuan kerja imigrasi.

Dalam sesi evaluasi, turut dibahas berbagai catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan penatausahaan, pengamanan, penggunaan, dan penghapusan BMN. Seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset guna meminimalkan temuan pemeriksaan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, dapat meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan sinergi dalam pengelolaan BMN sehingga terwujud tata kelola aset yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Hasil FGD akan menjadi bahan tindak lanjut dalam memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara dan satuan kerja di bawahnya.



Sebagaimana disampaikan dalam penutupan materi FGD, setiap rupiah uang rakyat yang berubah menjadi aset negara harus dikelola secara amanah. Aset yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi sarana pendukung pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi kekuatan organisasi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang semakin maju dan berkualitas.